

Penanggulangan Kejahatan Keuangan Di Indonesia Melalui Strategi Yang Komperhensif

Dewi Asri Puannandini^{*1}, Rahma Turisina W.D², Alviyanti Azzahra³,

Fikhri Farhan Mubarak⁴, Renzi Rizky Satria⁵.

[1][2][3][4][5] Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

Email: xyzra0903@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received [16 Desember 2024]

Revised [17 Februari 2025]

Accepted [17 Februari 2025]

Available Online [17 Februari 2025]

ABSTRACT

Financial crime poses a serious threat to the economic stability and integrity of the financial system in Indonesia, negatively impacting public trust and financial institutions. Addressing this issue requires a comprehensive approach that involves various legal, policy, and inter-agency collaboration aspects. This article discusses the strategic steps that need to be taken, including strengthening the existing legal framework, enhancing human resource capacity, and fostering collaboration among law enforcement agencies such as the Police, Prosecutor's Office, and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). Additionally, emphasizing public education about financial crimes and the implementation of modern technologies such as big data and artificial intelligence is crucial for detecting and preventing these criminal activities. By identifying existing barriers, such as a lack of understanding, coordination issues, and budget constraints, this article offers recommendations to improve the effectiveness of financial crime prevention efforts. With an integrated and sustainable strategy, it is hoped that Indonesia can create a safer environment for financial management and enhance economic stability.

Keyword: *Combating Crime, Financial Crime, Comprehensive Strategy.*

ABSTRAK

Kejahatan keuangan merupakan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan di Indonesia, berdampak negatif terhadap kepercayaan publik dan lembaga keuangan. Penanggulangan kejahatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai aspek hukum, kebijakan, dan kolaborasi antar lembaga. Artikel ini membahas langkah-langkah strategis yang perlu diambil, termasuk penguatan kerangka hukum,

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, penekanan pada edukasi masyarakat mengenai kejahatan keuangan dan penerapan teknologi modern seperti big data dan kecerdasan buatan menjadi kunci dalam mendeteksi dan mencegah praktik kejahatan ini. Melalui identifikasi hambatan yang ada, seperti kurangnya pemahaman, masalah koordinasi, dan keterbatasan anggaran, artikel ini menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan keuangan. Dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dalam pengelolaan keuangan dan meningkatkan stabilitas perekonomian.

Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, kejahatan Keuangan, Strategi Komprehensif.

© 2020 MJN. All rights reserved.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan keuangan merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia¹. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk tindakan ilegal, seperti pencucian uang, penipuan, dan penggelapan, yang dapat merugikan individu, perusahaan, dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan semakin kompleksnya sistem keuangan global dan kemajuan teknologi, modus operandi para pelaku kejahatan keuangan semakin canggih, sehingga memerlukan strategi yang lebih efektif

untuk mencegah dan menanggulangnya².

Salah satu faktor utama yang menyebabkan meningkatnya kejahatan keuangan adalah kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Banyak perusahaan dan lembaga keuangan yang belum menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai, sehingga membuka celah bagi tindakan kecurangan³. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan strategi manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko kejahatan keuangan.

¹ Sahrul, S., Wiranto, S., Yusnaldi, Y., Suwarno, P., & Widodo, P. (2024). Strategi Diplomasi Keamanan Maritim Untuk Menghadapi Ancaman Krisis Pangan Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 5757-5771.

² Ardison Asri, S. H. (2022). *Tindak Pidana Khusus*. CV Jejak (Jejak Publisher).

³ Falah, A. S., SE, M., Setiana, A. R., & SE, M. (2024). *Sistem Informasi Manajemen Keuangan: Implementasi dan Pengelolaan*. Takaza Innovatix Labs.

Penerapan teknologi informasi, seperti *big data*, analisis data, dan kecerdasan buatan, menjadi strategi efektif dalam mencegah kejahatan keuangan. Dengan teknologi ini, lembaga keuangan dapat mendeteksi pola mencurigakan dalam transaksi secara real-time dan segera mengambil tindakan jika ada indikasi kecurangan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi karyawan juga sangat penting, karena karyawan yang teredukasi akan lebih mampu mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Oleh karena itu, program pelatihan berkala perlu diadakan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan.

Tata kelola perusahaan yang baik, dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat, juga berperan dalam mencegah kejahatan keuangan. Dewan direksi dan komite audit harus berfungsi secara efektif untuk memastikan kebijakan dan prosedur diikuti. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta sangat penting untuk berbagi informasi dan sumber daya dalam mengidentifikasi serta menanggulangi kejahatan keuangan. Regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, termasuk sanksi berat bagi pelaku, juga diperlukan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Azmi Erya Syufa, dalam jurnal "*Bagaimana mencegah dan mengatasi kejahatan korporasi di indonesia pendekatan komprehensif*" menjelaskan bahwa Penting untuk mendorong tranparansi dalam kejahatan korporasi termasuk penyediaan informasi yang jelas bertentangan dengan kegiatan bisnis, keuangan dan kepemilikan saham perusahaan. Tidak hanya itu, akuntabilitas

dalam hal ini harus ditegakkan dengan cara memastikan bahwa benar pelanggar termasuk kejahatan korporasi dan diadili dengan memberikan sanksi yang sesuai korporasi merupakan entitas usaha yang hadir ditengah-tengah kehidupan negara yang maju, nantinya akan memberikan bantuan dalam masalah pembangunan ekonomi, dimana sebagian negara maju memiliki korporasi yang besar dan dapat menopang pembangunan nasional negara, namun hanya sedikit paham bahwa sesungguhnya korporasi tidak berwujud seperti manusia, sebab korporasi awalnya merupakan nomenklatur yang dipopulerkan oleh para pebisnis⁴.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Azmi Erya Syufa dalam jurnal "*Bagaimana Mencegah dan Mengatasi Kejahatan Korporasi di Indonesia: Pendekatan Komprehensif*," penekanan diberikan pada pentingnya transparansi dalam kejahatan korporasi. Penelitian tersebut menyoroti perlunya penyediaan informasi yang jelas terkait kegiatan bisnis, keuangan, dan kepemilikan saham perusahaan. Selain itu, akuntabilitas ditegaskan dengan memastikan bahwa pelanggar, termasuk pelaku kejahatan korporasi, diadili dan diberi sanksi yang sesuai. Penelitian ini juga menggarisbawahi peran korporasi dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara maju, di mana korporasi besar dapat menjadi penopang pembangunan nasional.

Sementara itu, penelitian saat ini lebih mendalami pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam penanggulangan kejahatan keuangan, dengan fokus pada kolaborasi antar lembaga, penggunaan teknologi modern, dan edukasi masyarakat. Penelitian ini tidak hanya membahas transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menyoroti pentingnya pemanfaatan big data dan

⁴ Syufa, A. E. (2023). Bagaimana mencegah dan mengatasi kejahatan korporasi di indonesia: pendekatan komprehensif. *UMSIDA*.

kecerdasan buatan dalam deteksi dini aktivitas mencurigakan. Selain itu, penelitian sekarang mencakup analisis hambatan yang lebih mendalam dan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan keuangan.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait penanggulangan kejahatan keuangan di Indonesia⁵. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik hukum yang ada, serta mengidentifikasi celah dan tantangan dalam implementasinya. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi strategi komprehensif yang tidak hanya memperkuat kerangka hukum, tetapi juga meningkatkan sinergi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah serta memberantas kejahatan keuangan secara efektif.

Pembahasan

a. Penanggulangan Kejahatan Keuangan Di Indonesia Melalui Strategi Yang Komperhensif.

Kejahatan keuangan merupakan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan di Indonesia, berdampak negatif pada masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan pemerintah. Penanggulangan kejahatan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, kebijakan, dan kolaborasi antar lembaga. Salah satu langkah penting adalah memperkuat kerangka hukum yang ada, meskipun Indonesia sudah memiliki undang-undang terkait

pencucian uang, korupsi, dan fraud. Implementasi undang-undang tersebut sering terhambat oleh kurangnya pemahaman dan sumber daya di kalangan penegak hukum, sehingga penyuluhan dan pelatihan yang berkesinambungan sangat diperlukan.

Selain memperkuat kerangka hukum, kolaborasi antara lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat penting untuk meningkatkan deteksi dan penanganan kasus kejahatan keuangan. Membangun jaringan informasi dan berbagi data antar lembaga akan mempercepat respons terhadap kejahatan ini, sementara kerja sama dengan lembaga internasional juga diperlukan karena sifat transnasional dari kejahatan keuangan. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui program edukasi dapat membantu publik memahami risiko dan konsekuensi dari kejahatan ini, mendorong mereka untuk melaporkan dugaan kejahatan, dan mendukung penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus yang ada.

Kasus PT Indofarma Tbk, dalam skandal keuangan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp371,8 miliar. Kasus PT Indofarma Tbk bermula pada tahun yang tidak disebutkan, ketika laporan audit internal mengindikasikan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan dugaan praktik korupsi dan kolusi dalam proses pengadaan obat-obatan. Beberapa pejabat di perusahaan terlibat dalam penggelembungan harga dan penyalahgunaan anggaran, yang secara signifikan merugikan perusahaan dan negara. Kerugian yang ditimbulkan dari

⁵ Setiawan, D. A. Strategi Penanggulangan Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi: Studi

Komparatif Antara Indonesia, Amerika, Dan Eropa. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 79-90.

praktik ini diperkirakan mencapai Rp371,8 miliar, mencakup pengeluaran yang tidak sah serta hilangnya potensi pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

Setelah pengungkapan skandal ini, pihak berwenang, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengambil tindakan hukum terhadap individu-individu yang terlibat. Beberapa pejabat perusahaan dipecat, dan kasus ini dibawa ke pengadilan. Proses hukum ini mencakup penyelidikan yang mendalam, yang bertujuan untuk mengungkap skema korupsi dan menetapkan pertanggungjawaban kepada mereka yang bersalah. Dampak dari skandal ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga berimbas pada reputasi PT Indofarma Tbk, yang mengalami penurunan drastis dalam nilai saham dan kepercayaan investor. Sebagai respons terhadap krisis ini, PT Indofarma Tbk meluncurkan serangkaian reformasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan transparansi. Perusahaan melakukan restrukturisasi manajemen dan menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya praktik korupsi. Selain itu, program pelatihan etika bisnis bagi karyawan juga diperkenalkan untuk membangun budaya integritas.

PT. Indofarma menerapkan strategi pengawasan internal yang ketat dan pelatihan bagi karyawan untuk mendeteksi dan mencegah praktik kecurangan, dari kasus PT indofarma yang penulis paparkan sebagai anallisa dari penelitian ini bahwa kemajuan teknologi dan kompleksitas sistem

keuangan, membuat pelaku kejahatan semakin kreatif dalam mengeksploitasi celah-celah yang ada. Penulis berpendapat pencegahan kejahatan keuangan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Strategi efektif untuk mencegah kejahatan keuangan melibatkan pendekatan multidimensional yang mencakup teknologi, regulasi, dan edukasi publik.

Mencegah kejahatan keuangan memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai pendekatan yang dapat diimplementasikan. Berdasarkan analisis literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada beberapa strategi guna mencegah kejahatan keuangan diantaranya sebagai berikut:

a. Penggunaan Teknologi Canggih

Salah satu strategi utama dalam mencegah kejahatan keuangan adalah pemanfaatan teknologi modern:

a) *Big Data* dan Analisis Data: Lembaga keuangan dapat menggunakan analisis *big data* untuk memonitor transaksi secara *real-time*. Dengan memanfaatkan algoritma *machine learning*, sistem dapat mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan mengidentifikasi potensi kejahatan sebelum terjadi⁶.

b) Kecerdasan Buatan (AI): AI dapat membantu dalam mengembangkan sistem pemantauan otomatis yang belajar dari data historis. Ini memungkinkan lembaga untuk meningkatkan akurasi dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan, serta mengurangi jumlah false

⁶ Dewi, F. S., & Dewayanto, T. (2024). Peran big data analytics, machine learning, dan artificial intelligence dalam pendeteksian financial

fraud: A systematic literature review. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3).

- positives yang mengganggu operasional⁷.
- c) *Blockchain*: Teknologi *blockchain* menawarkan transparansi dan keamanan dalam transaksi. Dengan mencatat semua transaksi dalam buku besar yang tidak dapat diubah, *blockchain* dapat mengurangi risiko pencucian uang dan penipuan, serta memberikan jejak audit yang jelas⁸.
- b. Regulasi yang Ketat dan Adaptif
- Regulasi yang kuat dan adaptif juga merupakan aspek penting dalam pencegahan kejahatan keuangan:
- a) Penguatan Kerjasama Internasional: Membangun kerjasama antarnegara dalam penegakan hukum sangat penting. Kejahatan keuangan sering kali bersifat transnasional, sehingga diperlukan mekanisme pertukaran informasi dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum di berbagai negara⁹.
- b) Penerapan Standar Internasional: Mengadopsi standar yang ditetapkan oleh organisasi internasional seperti *Financial Action Task Force*

- (FATF) dapat membantu negara dalam membangun kerangka kerja yang lebih efektif untuk mencegah kejahatan keuangan. Ini termasuk langkah-langkah untuk melaporkan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan¹⁰.
- c) Regulasi yang Fleksibel: Regulasi harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar. Ini termasuk kebijakan yang mendukung inovasi, sehingga lembaga keuangan dapat memanfaatkan teknologi terbaru untuk pencegahan kejahatan¹¹.
- c. Edukasi Publik dan Kesadaran Masyarakat
- Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kejahatan keuangan juga sangat penting:
- a) Program Edukasi dan Pelatihan: Lembaga keuangan dan pemerintah dapat mengadakan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko kejahatan keuangan. Ini termasuk pelatihan untuk karyawan lembaga keuangan dalam mengenali tanda-tanda aktivitas mencurigakan¹².

⁷ Sinaga, N. H., Irmayani, D., & Hasibuan, M. N. S. (2024). Mengoptimalkan Keamanan Jaringan Memanfaatkan Kecerdasan Buatan Untuk Meningkatkan Deteksi Dan Respon Ancaman. *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKOMSI)*, 7(2), 364-369.

⁸ Ivanka, K. A., & Nasution, N. A. (2025). PENERAPAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DIGITAL. *ECONOMIST: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 50-59.

⁹ Aksa, A., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama

Internasional. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 586-602.

¹⁰ Nuraini, R. W., Hasanah, C. A., & Yasmin, A. Z. (2024). MEKANISME PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM IMPLIKASI DAN RESOLUSI HUKUM PERBANKAN. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4).

¹¹ Hidayat, B. D., & Sebyar, M. H. (2024). Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor: (A Comparative Study). *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 888-899.

¹² Murti, P. W. K., & Sommaliagustina, D. IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA TERHADAP

- b) Kampanye Kesadaran: Kampanye informasi yang luas dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara melindungi diri dari penipuan. Ini bisa dilakukan melalui media sosial, seminar, dan materi cetak¹³.
- c) Akses ke Alat dan Sumber Daya: Masyarakat perlu diberikan akses ke alat dan sumber daya yang dapat membantu mereka mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan, seperti aplikasi pelaporan dan informasi tentang langkah-langkah perlindungan.

Secara keseluruhan, strategi efektif untuk mencegah kejahatan keuangan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi¹⁴. Dengan menggabungkan teknologi, pendidikan, tata kelola yang baik, kolaborasi, regulasi, audit internal, dan kerjasama internasional, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Upaya ini tidak hanya akan melindungi individu dan perusahaan, tetapi juga akan berkontribusi pada stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

b. Hambatan Dan Upaya Dalam Penerapan Strategi Yang Komperhensif

Dalam penerapan strategi komperhensif untuk penanggulangan

kejahatan keuangan, terdapat berbagai hambatan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan di kalangan aparat penegak hukum mengenai kejahatan keuangan¹⁵. Banyak petugas penegak hukum yang tidak memiliki pelatihan khusus atau pemahaman mendalam tentang jenis-jenis kejahatan ini, seperti pencucian uang dan penipuan. Ketidapahaman ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengumpulan bukti dan penanganan kasus secara efektif, sehingga mengurangi tingkat keberhasilan penegakan hukum¹⁶.

Hambatan lainnya adalah masalah koordinasi antar lembaga. Penanggulangan kejahatan keuangan memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga keuangan. Namun, sering kali terjadi kurangnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga ini, yang dapat menghambat alur informasi yang penting untuk mendeteksi dan menangani kejahatan keuangan¹⁷. Birokrasi yang rumit dan perbedaan kebijakan antar lembaga juga dapat memperburuk situasi ini, membuat penanganan kasus menjadi tidak efisien.

Kendala anggaran juga menjadi hambatan yang signifikan dalam penerapan strategi komperhensif. Penanggulangan kejahatan keuangan memerlukan investasi yang cukup untuk

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG.

¹³ Aditya, A. (2024). UPAYA PREVENTIF CEGAH KEJAHATAN SIBER DAN PENYALAHGUNAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI SOSIALISASI UU ITE. *Jurnal AbdiMas Nusa Mandiri*, 6(1), 22-27.

¹⁴ Musthofa, H., & Zulfiani, A. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENINGKATAN TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA.

¹⁵ Arifuddin, I. F., & Yusuf, H. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak

Pidana Ekonomi Khusus Di Sektor Perbankan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5398-5413.

¹⁶ Marbun, R., & Rosalina, F. (2022). *In series hukum acara pidana, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan*. Publica Indonesia Utama.

¹⁷ Hariwangsa, T., & Yuningsih, H. (2024). Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 30(4), 121-130.

teknologi, pelatihan, dan infrastruktur yang mendukung¹⁸. Namun, sering kali anggaran yang dialokasikan untuk penegakan hukum tidak memadai, sehingga lembaga-lembaga ini kesulitan dalam mengimplementasikan strategi yang efektif. Dalam banyak kasus, keterbatasan anggaran mengakibatkan penggunaan sistem dan teknologi yang ketinggalan zaman, sehingga menghambat kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan keuangan secara proaktif.

Selain itu, tantangan budaya dan sikap masyarakat juga menjadi hambatan dalam penerapan strategi komprehensif. Banyak masyarakat yang masih skeptis terhadap lembaga penegak hukum dan merasa bahwa melaporkan kejahatan keuangan tidak akan memberikan hasil yang signifikan¹⁹. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan kejahatan keuangan. Ketidakpercayaan ini sering kali berakar dari pengalaman buruk di masa lalu, di mana kasus-kasus tidak ditangani dengan serius atau transparan.

Dalam penanggulangan kejahatan keuangan, langkah awal yang krusial adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pemahaman mendalam tentang jenis-jenis kejahatan keuangan, teknik penyelidikan, dan prosedur hukum yang berlaku. Dengan keterampilan yang memadai, mereka diharapkan dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien, sehingga meningkatkan kemampuan lembaga dalam menangani kasus-kasus yang ada.

Kolaborasi antar lembaga juga sangat penting untuk mengatasi hambatan koordinasi dalam penanggulangan kejahatan keuangan. Membangun jaringan komunikasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat memfasilitasi pertukaran informasi yang diperlukan. Pembentukan tim gabungan dari berbagai lembaga akan mempercepat pengambilan keputusan dan respons terhadap kasus, serta meningkatkan sinergi dalam penanganan masalah ini.

Selain itu, peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung penanggulangan kejahatan keuangan harus menjadi perhatian pemerintah. Investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan keuangan sangat penting. Penggunaan sistem informasi canggih dan perangkat lunak analisis data memungkinkan lembaga untuk memonitor transaksi keuangan secara real-time, sehingga mendukung deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan. Edukasi publik melalui kampanye kesadaran juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kejahatan keuangan dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam penanggulangan masalah ini.

Kesimpulan

Penanggulangan kejahatan keuangan di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, mengingat dampak seriusnya terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Langkah awal yang penting adalah memperkuat kerangka hukum yang ada dengan peningkatan pemahaman dan keterampilan aparat penegak hukum.

¹⁸ Kurniawan, A. F. (2024). Peran Sistem Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Audit Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 936-948.

¹⁹ Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.

Keterlibatan lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK dalam kolaborasi yang erat, serta kerja sama internasional, sangat penting untuk mendeteksi dan menangani kejahatan secara efektif.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kejahatan keuangan melalui program edukasi dan kampanye informasi juga merupakan aspek penting. Kasus-kasus nyata, seperti skandal PT Indofarma Tbk, menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan keuangan dan transparansi. Keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan keuangan bergantung pada penggabungan teknologi canggih, regulasi yang adaptif, dan edukasi publik yang efektif.

Dalam penerapan strategi komprehensif, terdapat berbagai hambatan yang signifikan, seperti kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum, masalah koordinasi antar lembaga, dan kendala anggaran. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi ancaman kejahatan keuangan juga menghambat upaya pencegahan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan sangat penting.

Mengatasi kurangnya koordinasi antar lembaga dapat dilakukan dengan membangun jaringan komunikasi yang efektif dan pembentukan tim gabungan. Selain itu, peningkatan alokasi anggaran untuk teknologi dan infrastruktur juga diperlukan untuk mendukung upaya penanggulangan. Regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi akan membantu dalam menanggapi ancaman kejahatan keuangan yang semakin canggih.

Secara keseluruhan, untuk menghadapi tantangan kejahatan keuangan, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, serta penerapan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan

demikian, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan dalam pengelolaan keuangan, serta meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ardison Asri, S. H. (2022). *Tindak Pidana Khusus*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Falah, A. S., SE, M., Setiana, A. R., & SE, M. (2024). *Sistem Informasi Manajemen Keuangan: Implementasi dan Pengelolaan*. Takaza Innovatix Labs.

Marbun, R., & Rosalina, F. (2022). *In series hukum acara pidana, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan*. Publica Indonesia Utama.

Sumber Lain

Aditya, A. (2024). UPAYA PREVENTIF CEGAH KEJAHATAN SIBER DAN PENYALAHGUNAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI SOSIALISASI UITE. *Jurnal AbdiMas Nusa Mandiri*, 6(1), 22-27.

Aksa, A., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 586-602.

Arifuddin, I. F., & Yusuf, H. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Sektor Perbankan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5398-5413.

Dewi, F. S., & Dewayanto, T. (2024). Peran big data analytics, machine learning, dan artificial intelligence dalam pendeteksian financial fraud: A systematic literature review. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3).

Hariwangsa, T., & Yuningsih, H. (2024). Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin: Majalah Civitas*

Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, 30(4), 121-130.

Hidayat, B. D., & Sebyar, M. H. (2024). Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor:(A Comparative Study). *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 888-899.

Ivanka, K. A., & Nasution, N. A. (2025). PENERAPAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DALAM TRANSAKSI DI ERA DIGITAL. *ECONOMIST: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 50-59.

Kurniawan, A. F. (2024). Peran Sistem Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Audit Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 936-948.

Marzuki, I. (2024). Korupsi sebagai Kejahatan Serius: Evaluasi Peran Lembaga Anti-Korupsi. *Policy and Law Journal*, 1(1), 16-26.

Murti, P. W. K., & Sommaliagustina, D. IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG.

Musthofa, H., & Zulfiani, A. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENINGKATAN TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA.

Nuraini, R. W., Hasanah, C. A., & Yasmin, A. Z. (2024). MEKANISME PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM IMPLIKASI DAN RESOLUSI HUKUM PERBANKAN. *Jurnal*

- Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4).
- Purba, R. E., Maharani, D., BMY, M. A. A., & Al Zahra, R. Z. (2024). Peranan Hukum Positif Dalam Mengatur Cyberspace Untuk Menghadapi Tantangan Dan Peluang Di Era Digital. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 167-176.
- Sahrul, S., Wiranto, S., Yusnaldi, Y., Suwarno, P., & Widodo, P. (2024). Strategi Diplomasi Keamanan Maritim Untuk Menghadapi Ancaman Krisis Pangan Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 5757-5771.
- Setiawan, D. A. Strategi Penanggulangan Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi: Studi Komparatif Antara Indonesia, Amerika, Dan Eropa. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 79-90.
- Sinaga, N. H., Irmayani, D., & Hasibuan, M. N. S. (2024). Mengoptimalkan Keamanan Jaringan Memanfaatkan Kecerdasan Buatan Untuk Meningkatkan Deteksi Dan Respon Ancaman. *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKOMSI)*, 7(2), 364-369.
- Sudrajat, S., & Yusuf, H. (2024). Mengungkap Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia—Tantangan, Solusi, dan Perspektif Masa Depan. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10669-10676.
- Syufa, A. E. (2023). Bagaimana mencegah dan mengatasi kejahatan korporasi di indonesia: pendekatan komprehensif. *UMSIDA*.